



Pilwalkot

Minim Politik Uang

JOGJA, BERNAS - Indikator praktik politik uang yang biasanya mewarnai di setiap pelaksanaan Pilkada, tidak mencuat ke publik dalam Pilwalkot Yogyakarta 2017. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY mencatat indeks kerawanan pemilu (IKP) perihal politik uang di Kota Yogyakarta sangat rendah. Hal itu dibuktikan tidak adanya laporan ataupun temuan pelanggaran politik uang.

"IKP di Kota Yogyakarta relatif rendah dibandingkan daerah lain seperti Gunungkidul ataupun Kulonprogo. Benar, sejauh ini dari sebaran petugas dan relawan yang ada, kita tak menemukan bukti kuat adanya pelanggaran praktik-praktik money politic. Dari hasil pengawasan kita semua sudah berjalan apa adanya sesuai keputusan KPU (Kota Yogyakarta)," katanya.

Ditanya soal surat suara tidak sah yang mencapai 14.355 lembar, apakah berkorelasi dengan pemilih yang pragmatis yang dimungkinkan karena mereka tidak mendapatkan imbalan uang dari salah satu paslon, sehingga cenderung merusak surat suara, Nadjib menyatakan tidak ada korelasinya. "Saya pikir itu (surat suara tidak sah) kesengajaan sebagai bentuk protes pemilih dengan cara tidak memilih salah satu paslon," ujar Najib.

Menurutnya, tingginya surat suara tidak sah dimungkinkan karena faktor kesengajaan pemilih. Hal itu terindikasi dari banyaknya surat suara yang dicoblos di beberapa titik yang berbeda kolom. "Ada kecenderungan pemilih sengaja merusak surat suara. Karena mungkin mereka tidak ada yang cocok kepada kedua paslon," katanya.

Mengapa datang ke TPS jika akhirnya hanya melakukan pengrusakan surat suara? "Ada kemungkinan mereka kuatir hak pilihnya akan digunakan orang lain sehingga tetap datang ke TPS. Selain itu ada kemungkinan pekeuh (nggak enak) dengan tokoh maupun KPSS di lingkungannya karena sudah mendapatkan undangan memilih tapi kok nggak datang ke TPS," katanya.

Mmenanggapi kubu paslon nomor satu Imam Priyono-Ahmad Fadli yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Najib mengatakan hal itu hak politik paslon bersangkutan. "Bagi Bawaslu dan Panwas Kota saat ini menyiapkan berkas-berkas selama pelaksanaan (Pilwalkot) yang nantinya diperlukan MK," katanya.

Ketua Tim Pemenangan Paslon Imam-Fadli, Danang Rudyatmoko, menjelaskan materi gugatan yang disampaikan ke MK di antaranya mengenai banyaknya surat suara tidak sah yang mencapai 14.355 lembar serta data kependudukan pemilih. "Semua dokumen yang diperlukan sudah kami bawa, termasuk dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Yogyakarta," kata Danang dalam keterangan persnya.

Danang menegaskan, tujuan utama gugatan yang dilayangkan ke MK adalah untuk menjaga hak demokrasi warga negara, bukan pada kemenangan. Disamping mendaftarkan ke MK, tim pemenangan pasangan calon nomor satu itu juga melaporkan penyelenggara pemilu ke DKPP karena dinilai tidak konsisten, khususnya keputusan untuk membuka surat suara tidak sah pada saat rekapitulasi.

Pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kota Yogyakarta dilakukan pembukaan kotak suara tidak sah untuk 11 TPS di Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo. KPU Kota Yogyakarta memutuskan hanya mengambil sampel dua surat suara per TPS.

Selain KPU Kota Yogyakarta, tim pemenangan tersebut juga melaporkan PPK yang tidak menjalankan rekomendasi dari Panwascam pada saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. "Kami juga melaporkan adanya warga yang kehilangan hak suara," ujarnya. (age)

▶ ke hal 7

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2.			
3.			
4.			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 11 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005